

PENGARUH MANAJEMEN LABA, CORPORATE GOVERNANCE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian
yang Listing di BEI 2013-2015)

Imron Septiadi¹⁾ Anton Robiansyah²⁾
Eddy Suranta³⁾

Universitas Bengkulu
imronseptiadi87@gmail.com
antonrobiansyah04@gmail.com
eddysuranta123@gmail.com

Abstract

This research aimed to present an empirical evidence influence of earnings management, corporate governance, and corporate social responsibility disclosure on tax avoidance. Earnings management measured using model jones, corporate governance mechanism seen from institutional ownership, managerial ownership, audit committee, audit quality. Disclosure of corporate social responsibility using the global reporting initiative generation four (GRI-G4). Tax avoidance as measured by cash effective tax rate (CETR). The sampling method using purposive sampling and data was analyzed using multiple linear regression. The results show that earnings management and corporate social responsibility influence on action of tax avoidance. Meanwhile, Institutional ownership, managerial ownership, audit committees and audit quality does not influence on action of tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, earnings management, corporate governance, corporate social responsibility disclosure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh manajemen laba, corporate governance, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Manajemen laba diukur menggunakan model jones, corporate governance dilihat dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit. Pengungkapan corporate social responsibility menggunakan global reporting initiative generasi keempat (GRI-G4). Tax avoidance diukur dengan cash effective tax rate (CETR). Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa manajemen laba dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: Tax avoidance, manajemen laba, corporate governance, pengungkapan corporate social responsibility

Pendahuluan

Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini dikarenakan laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang tinggi pula, sehingga merugikan perusahaan dan memicu dilakukannya tindakan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* merupakan upaya

penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya melalui celah peraturan (*loopholes*) (Suandy, 2014).

Motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* salah satunya terkait

dengan adanya insentif non pajak. Insentif non pajak yaitu fasilitas selain dari pajak meliputi diantaranya yaitu *earnings pressure*, tingkat hutang (*leverage*), ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial (Wijayanti dan Slamet, 2012) dimana bertujuan mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengatur besarnya laba perusahaan yang sering juga disebut manajemen laba.

Manajemen laba adalah suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Intervensi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan. Munculnya praktik manajemen laba yang mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak yang dilandasi oleh motivasi pajak. Scott (2009) menjelaskan dalam motivasi pajak, manajer melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Aktivitas penghindaran pajak ini terjadi karena adanya konflik agensi sebagai akibat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik akan fokus pada kemakmurannya, sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan manajemen seringkali mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan keinginan pemilik perusahaan dan melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* menjelaskan bahwa manajer melakukan tindakan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya saja (Kamila dan Martani, 2013).

Tindakan penghindaran pajak dan masalah keagenan dapat diminimalisasi

dengan *corporate governance*. Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* yaitu seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Arifin, 2007). Mekanisme *corporate governance* yang baik diantaranya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit.

Pertama, Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Winata, 2014). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik sehingga akan berdampak berkurangnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Kedua, dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan karena dengan keputusan yang diambil salah, maka juga akan berimbas pada manajer itu sendiri. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas *tax avoidance* (Dyan, 2016).

Ketiga, Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif dapat mengurangi tingkat kecurangan oleh manajer (Siallagan dan Machfoez, 2006) sehingga dengan hal ini aktivitas *tax avoidance* dapat diminimalisasi bahkan perusahaan tidak akan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Keempat, kualitas audit yang diaudit KAP *Big Four* atau KAP *Non Big Four*. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The*

Big four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat diindikasikan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Seluruh kegiatan perusahaan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, sehingga perusahaan haruslah bertanggung jawab. Pertanggungjawaban perusahaan yaitu dengan melakukan tanggung jawab sosial yang sering disebut *corporate social responsibility*. Teori legitimasi menjelaskan perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011). Teori legitimasi inilah yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan *tax avoidance*. Perusahaan mengungkapkan CSR yang tinggi akan mendapatkan reputasi sangat baik di mata masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan menjaga reputasinya yang baik, dengan cara taat membayar pajak dan tidak melakukan *tax avoidance*.

Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang manajemen laba, *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Pohan (2008); Khurana dan Moser (2009); Annisa dan Kurniasih (2012); Lanis dan Richardson (2012), (2013); Trisna dkk. (2012); Fadhillah (2014); Khoirunnisa (2014); Winarsih dkk. (2014); Winata (2014); Tiaras dan Wijaya (2015); Lee dan Swenson (2010); Watson (2015); Wahyudi (2015); Hamed dan Boussaidi (2015); Dyan (2016); Rahmawati dkk. (2016); Winda dkk. (2016).

Hasil dari penelitian sebelumnya Tiaras dan Wijaya (2015) dan Winda dkk. (2016), menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan hasil penemuan Lee dan Swenson (2010) tidak adanya pengaruh antara manajemen laba dengan perencanaan pajak di bagian Asia dan Trisna dkk. (2012), tidak ada pengaruh signifikan antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Khoirunnisa (2014); Fadhillah (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Pohan (2008); Khurana dan Moser (2009); Dyan (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hamed dan Boussaidi (2015); Rahmawati dkk. (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan Dyan (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Behubungan dengan komite audit, Annisa dan Kurniasih (2012); Winata (2014) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan Khoirunnisa (2014); Winarsih dkk., (2014) menemukan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Khoirunnisa, 2014; Fadhillah, 2014; Dyan, 2016) sedangkan Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* lalu Winata (2014) menemukan tidak ada pengaruh antara kualitas audit dan *tax avoidance*. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Wahyudi, 2015) sedangkan penelitian dari Lanis dan Richardson (2013); Dyan (2016), Rahmawati dkk. (2016), menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax*

avoidance namun disisi lain penelitian Lanis dan Richardson (2012), Winarsih (2014), dan Watson (2015) menjelaskan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mendorong peneliti untuk menguji kembali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah manajemen laba, *corporate governance* dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertanyaan penelitian dari perumusan masalah tersebut adalah: 1) apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 2) apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 3) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 4) apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 5) apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 6) Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama teori agensi mengenai hubungan manajemen laba dan *corporate governance* dengan *tax avoidance* serta teori legitimasi mengenai hubungan *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance*. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada pemakai laporan keuangan dan praktisi dalam hubungannya manajemen laba, *corporate governance*, *corporate governance* dengan *tax avoidance*.

Kajian Literatur

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) terjadi ketika pemilik sumber daya ekonomis (*principal*)

memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) dalam mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Hubungan keduanya ini disebabkan adanya kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Schroeder *et al.*, (2014) menyatakan teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan keuntungan miliknya. Pemilik hanya tertarik pada hasil investasinya di perusahaan tersebut sedangkan manajer menginginkan kepuasan pekerjaannya berupa kompensasi keuangan dan yang berhubungan dengan hal tersebut. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik agensi.

Konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan antara *principal* dan *agent*, sehingga timbulnya asimetris informasi. Asimetris informasi ini menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik. Manajer akan mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) dan memanfaatkan pos-pos akruar guna menyajikan laba sesuai dengan kepentingan manajemen yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak pemilik (Trisna dkk., 2012) yang sering disebut manajemen laba. Sebagai insentif non pajak, manajemen laba berpengaruh pada besarnya pajak yang dibayarkan sehingga berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Hubungan lainnya dapat dijelaskan bahwa salah satu motivasi perusahaan melakukan manajemen laba yaitu motivasi pajak. Scott (2009) menjelaskan manajer melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Tindakan *tax avoidance* juga merupakan masalah agensi dan hubungan ini dapat dijelaskan dengan pandangan kontemporer. Dalam penelitian Kamila dan Martani (2013) pandangan kontemporer

tentang tindakan *tax avoidance* didefinisikan sebagai bentuk *rent extraction*. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan *tax avoidance* dalam pandangan kontemporer mempunyai dua tujuan. Tidak hanya untuk menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tetapi juga untuk menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham.

Dalam penelitian Kamila dan Martani (2013) sifat yang komplementer antara tindakan *tax avoidance* dengan *rent extraction* serta begitu kompleksnya transaksi pajak yang dilakukan menyebabkan nilai perusahaan akan menurun, hal inilah yang tidak diinginkan oleh prinsipal. Menurunnya nilai perusahaan di pasar yang tercermin melalui harga sahamnya. Penurunan harga saham ini dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dalam rangka *rent extraction* (Desai dan Dharmapala, 2006).

Konflik antara investor dan manajer menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik (*principal*) yang bertujuan memastikan bahwa manajer (*agent*) bertindak sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemilik. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan biaya agensi yang muncul dari konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* berpotensi menimbulkan jenis biaya yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. Masalah agensi ini dapat diminimalisasikan dengan adanya *corporate governance*. Ujijantho dan Pramuka (2007) menjelaskan bahwa *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan keyakinan bagi investor bahwa manajer memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak bertindak

sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Konsep legitimasi menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, perusahaan sadar akan keberlangsungan hidupnya berhubungan juga dengan citra perusahaan di mata masyarakat (Dyan, 2016).

Deegan, *et al* (2002) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Mempertahankan legitimasi ini perusahaan akan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Perusahaan) guna mempertanggungjawabkan akibat dari aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Lindblom (1994) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat mengungkapkan CSR untuk memperlihatkan perhatian manajemen terhadap nilai-nilai masyarakat dari pengaruh negatif aktivitas perusahaan. *Corporate Social Responsibility* merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Sesuai dengan perspektif teori legitimasi, semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin

mendapatkan citra yang positif dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan menjaga reputasinya yang baik, sehingga akan menghindari tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Apabila perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* maka perusahaan akan mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Landolf, 2006).

Manajemen Laba dan *Tax Avoidance*

Menurut Schipper (1989) manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan konflik agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer. Pemisahan antara pemilik dan manajer ini menimbulkan asimetris informasi dimana manajer lebih mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga melakukan tindakan untuk keuntungannya sendiri salah satunya adalah aktivitas manajemen laba.

Hubungan antara manajemen laba dengan *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan motivasi perusahaan melakukan manajemen laba dengan motivasi pajak (Scott, 2009). Manajemen laba dapat mempengaruhi perencanaan pajak karena atas manajemen laba akan mengubah pendapatan kena pajak yang nantinya mengubah beban pajak (Kamila dan Martani, 2013). Salah satu tindakan perencanaan yang dapat dilakukan melalui penghindaran pajak atau sering disebut *tax avoidance*. *Tax avoidance* ini merupakan upaya bagi perusahaan untuk

meminimalkan besarnya pajak yang dibayarkan secara legal melalui celah-celah perundang-undangan (Suandy,2014). Manajemen laba merupakan insentif non pajak dalam melakukan *tax avoidance* (Wijayanti dan Slamet, 2012).

Beberapa penelitian meneliti hubungan antara *tax avoidance* dan manajemen laba, hasilnya menjelaskan perusahaan akan *manage* laba akuntansi untuk meminimalkan besarnya laba kena pajak (Tiaras dan Wijaya, 2012; Winda dkk., 2016). Dari beberapa penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin perusahaan melakukan tindakan manajemen laba maka akan menyebabkan semakin rendah nilai CETR perusahaan tersebut, dari nilai CETR yang rendah maka semakin besar perusahaan melakukan *tax avoidance*.

H1 : Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance*

Jensen dan Meckling (1976) menerangkan bahwa teori agensi menjelaskan konflik agensi timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Pemilik hanya berfokus pada investasinya dan manajer menginginkan kompensasi keuangan maupun yang berhubungan dengan hal tersebut dari kegiatannya mengelola perusahaan. Selain itu dikarenakan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer, menimbulkan asimetris informasi. Asimetri informasi ini menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal perusahaan dan akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri (*opportunitis*) dengan mengabaikan kepentingan pemilik.

Sesuai dengan prespektif dari konflik agensi, untuk mengurangi permasalahan antara pemilik dan manajer serta tindakan

manajer yang *opportunitis* yaitu dengan cara adanya *Corporate Governance* yang salah satunya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi internal (Sujoko dan Subiantoro, 2007). Tujuan adanya kepemilikan institusional yaitu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyanto dan Pramuka, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008); Khurana dan Moser (2009); Dyan (2016) menemukan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* perusahaan. Apabila kepemilikan institusional semakin besar maka nilai CETR perusahaan akan ikut tinggi pula sehingga diindikasikan perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dan sebaliknya semakin kecil kepemilikan institusional maka nilai CETR akan menjadi rendah sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance*.

H2 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Manajerial dan Tax Avoidance

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2011). Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) diukur dengan presentase

jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016).

Konflik agensi menjelaskan bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan berbeda apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamed dan Boussaidi (2015); Rahmawati dkk. (2016) menemukan perusahaan yang dengan presentase kepemilikan manajerial yang tinggi maka akan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kepemilikan manajerial dalam perusahaan yang semakin besar, maka nilai CETR akan meningkat dengan alasan manajer akan patuh dalam membayar pajak dimana manajer cenderung tidak melakukan *tax avoidance*

H3 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Komite Audit dan Tax Avoidance

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang yang anggotanya berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Fungsi komite audit ini dapat mengurangi konflik agensi karena dapat melakukan pengawasan terhadap manajer agar tidak melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri.

Teori agensi menjelaskan bahwa salah satu untuk meminimalkan konflik agensi yaitu dengan adanya *corporate governance* (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu mekanisme *corporate governance* yaitu komite audit. Komite Audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi kecurangan yang akan dilakukan manajemen. Komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006).

Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012); Winata (2014) menemukan adanya pengaruh signifikan antara komite audit dengan aktivitas *tax avoidance* yang mengartikan bahwa jumlah komite audit yang sesuai dengan syarat yaitu minimal 3 orang dapat meminimalisasi tindakan manajemen yang berhubungan dengan kepentingan pajak. Semakin banyak jumlah komite audit ataupun sesuai syarat peraturan OJK, maka nilai CETR perusahaan akan menjadi besar yang mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

H4 = Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Kualitas Audit dan Tax Avoidance

Konflik agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Cara untuk mengurangi adanya konflik agensi dibutuhkan *corporate governance* yang baik, salah satunya yaitu adanya transparansi melalui kualitas audit mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Transparansi yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit (Jensen dan Meckling, 1976).

Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi apakah perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* atau tidak (Annisa dan Kurniasih, 2012). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dapat dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, karena perusahaan yang diaudit KAP *The Big Four* tingkat kecurangan lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Khoirunnisa, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2014); Fadhilah (2014); Dyan (2016) membuktikan bahwa adanya pengaruh antara kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang telah dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan KAP Non *The Big Four*. Sehingga perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan menghasilkan nilai CETR yang tinggi dikarenakan perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

H5 = Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Perusahaan akan meligitimasi dirinya melalui

pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan (Arthana, 2011). Pengungkapan CSR yang tinggi akan memberikan citra yang positif untuk perusahaan. Perusahaan akan menjaga citra positif dari masyarakat ini dengan cara membayar pajak dan tidak melakukan *tax avoidance* yang dilihat dari nilai CETR yang tinggi.

Watson (2011), Lanis Ricardson (2012) dan (2013), dalam penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang sadar sosial (*high level CSR*) cenderung kurang agresif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (*low level CSR*) dalam kebijakan penghindaran pajaknya. Pengungkapan CSR yang tinggi akan menyebabkan semakin besar nilai CETR yang dimiliki perusahaan, dimana nilai CETR yang tinggi menjelaskan bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak ada ataupun menjadi rendah.

H6 = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Metode Penelitian

Pemilihan dan Pengumpulan data

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu yaitu perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015 karena kegiatan operasionalnya berhubungan langsung dengan sumber daya alam, memiliki data laporan keuangan yang lengkap, perusahaan menggunakan nilai mata

uang rupiah, tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, periode pembukuan berakhir pada 31 desember dan ada informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan variabel. Data dikumpulkan diperoleh melalui melalui situs www.idx.co.id, *IDX Fact Book* untuk melihat *Public Accounting* perusahaan dan www.sahamok.com.

Pengukuran dan Definisi Variabel

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Suandy, 2014). Dalam mengukur penghindaran pajak yaitu menggunakan proksi Cash ETR (Huseynov dan Kalm, 2012). Pengukuran Cash ETR sebagai berikut:

$$CashETR_{it} = \frac{CashTaxesPaid_{it}}{PretaxIncome_{it}}$$

Keterangan:

CashETR_{it} = Pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak

2. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* dengan *Modified Jones Model* (1991), sebagai berikut:

1) Total *Accrual*

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2) *Nondiscretionary Total Accrual* dengan menggunakan regresi

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

3) *Nondiscretionary Total Accrual* (NDTA)

$$NDTA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it} - \Delta TRec_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

4) *Discretionary Total Accrual* (DTA)

$$DTA = \frac{TAC}{TA_{it-1}} - NDTA$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total *Accrual* Perusahaan i pada periode t

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi (*cash flow of operation*) perusahaan i pada periode t (dimana seluruhnya dibagi dengan total aset t-1)

TA_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta Sales_{it}$ = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1

β = Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi.

$\Delta TRec$ = Piutang usaha perusahaan i pada periode t dikurangi piutang usaha pendapatan pada periode t-1

PPE_{it} = *Gross property, plant, and equipment*

ε_{it} = Error

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi (Rahmawati dkk., 2016; Dyan, 2016).

$$INST = \frac{JSI}{TMS}$$

INST= Proporsi Kepemilikan Konstitusional
JSI = Jumlah Saham yang Dimiliki oleh Investor Institusi

TMS = Total Modal Saham yang beredar

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh manajemen perusahaan (dewan komisaris, direksi, maupun karyawan). Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016) dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan 100% (Rahmawati dkk. 2016).

$$KM = \frac{JSM}{TMS}$$

KM = Proporsi Kepemilikan Manajerial

JSI = Jumlah Saham yang Dimiliki oleh Manajerial

TMS = Total Modal Saham yang beredar

5. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Rahmawati dkk., 2016).

6. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan

pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Kualitas audit diukur melalui proksi ukuran KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four*. Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel dummy. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

7. Corporate Social Responsibility

Pengukuran CSR digunakan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 6 indikator yaitu indikator ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk dalam pedoman *Sustainability Report Global Reporting Initiative Generation Four* (GRI-G4). Selanjutnya total nilai pengungkapan digunakan untuk mengukur indeks CSR. Adapun rumus yang bisa digunakan sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$$

Keterangan:

$CSRI_j$ = Indeks Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan i

$\sum X_{yi}$ = nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan

ni = Jumlah pengungkapan untuk perusahaan

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka model regresi diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Hal ini dilakukan agar model tidak terdapat masalah autokorelasi, multikolenieritas, heterokedastisitas dan data terdistribusi normal. Model persamaan

regresi menggunakan data panel dan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CashETR}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{EM}_{it} + \beta_2 \text{KI}_{it} + \beta_3 \text{KM}_{it} + \beta_4 \text{KA}_{it} + \beta_5 \text{AUDIT}_{it} + \beta_6 \text{CSR}_{it} + \beta_7 \text{SIZE}_{it} + \beta_8 \text{LEV}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

CashETR_{it} = *Tax Avoidance*

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_9$ = Koefisien variabel penjelas

INDP_{it} = Proposi Dewan Komisaris Independen

EM_{it} = Manajemen Laba

KI_{it} = Kepemilikan Institusional

KM_{it} = Kepemilikan Manajerial

KA_{it} = Komite Audit

AUDIT_{it} = Kualitas Audit

CSR_{it} = Pengungkapan CSR

SIZE_{it} = Ukuran Perusahaan

LEV_{it} = Tingkat Hutang Perusahaan

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Deskriptif Statistik

Seluruh Variabel					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	61	0.0141	1.0596	0.3639	0.2651
EM	61	-0.2035	0.2465	-0.0180	0.0861
KI	61	0	0.9758	0.6083	0.2676
KM	61	0	0.8135	0.0437	0.1251
KA	61	3	5	3.1630	0.4155
CSR	61	0.0549	0.5934	0.2989	0.1804
SIZE	61	25.7802	31.087	29.0042	1.2958
LEV	61	0.0412	0.8184	0.4584	0.2015
Variabel Kategorial					
KAP					
Kategori	Dummy	Jumlah (N)	(%)		
Non Big Four	0	29	47,5		
Big Four	1	32	52,5		
Total		61	100		

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif dari jumlah observasi (N) adalah sebanyak 61 observasi. Variabel penelitian pertama dalam statistik deskriptif adalah variabel tindakan *tax avoidance* yang diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax*

Rate). Nilai rata-rata variabel CETR sebesar 0.363929 menggambarkan bahwa rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel cenderung tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, dimana nilainya sebesar 36% yang lebih besar dari tarif pajak efektif perusahaan yaitu 25%. Nilai maksimum dari variabel CETR sebesar 1.059556 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang terdapat dalam sampel membayar pajak yang lebih banyak dari akibat adanya akumulasi hutang pajak tahun sebelumnya yang dibayarkan sekarang oleh perusahaan. Nilai minimum dari variabel CETR sebesar 0.014078 yang menjelaskan perusahaan diindikasikan melakukan *tax avoidance* terbesar dimana perusahaan yang dijadikan sampel memiliki nilai CETR yang lebih kecil dari tarif pajak efektif yaitu 25%.

Variabel selanjutnya yaitu manajemen laba (EM) dimana nilai rata-rata dari EM yaitu sebesar -0.018030. Nilai rata-rata dari variabel EM menggambarkan bahwa secara rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian melakukan manajemen laba dengan pola *income minimanization* atau *income decreasing*. Nilai maksimum dari variabel EM adalah 0.246498 yang menjelaskan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel melakukan pola manajemen laba dengan bentuk *income increasing* atau *income maximization* yang tertinggi. Nilai minimum dari variabel EM adalah sebesar -0.203593 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara *income decreasing* atau *income minimanization* tertinggi.

Variabel *corporate governance* yang diukur dengan proporsi kepemilikan institusional (KI). Variabel KI menunjukkan nilai rata-rata yaitu sebesar 0.608322 yang menjelaskan bahwa rata-rata kepemilikan institusional (KI) dari perusahaan yang dijadikan sampel yaitu sebesar 60,8322% dari

total keseluruhan saham yang beredar. Nilai maksimum dari variabel KI dari perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah sebesar 0.9755758 yang menunjukkan bahwa ada perusahaan yang kepemilikan institusionalnya paling tinggi yaitu sebesar 97.6% tersebut dan menjelaskan perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham institusional. Selanjutnya nilai minimum dari variabel KI yaitu sebesar 0 yang menunjukkan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel tidak memiliki pemegang saham institusional karena saham pada perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah.

Variabel KM dari perusahaan yang dijadikan sampel memiliki nilai rata-rata kepemilikan manajerial yaitu sebesar 0.043662 dan menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memiliki 4.3662% saham manajerial dari keseluruhan saham yang beredar. Nilai maksimum dari variabel KM yaitu sebesar 0.813474 menjelaskan bahwa presentase kepemilikan saham manajerial dari perusahaan yang paling tinggi sebesar 81.3474%. Nilai minimum KM dari perusahaan yang diteliti sebesar 0 yang menjelaskan tidak ada kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan tersebut.

Komite audit (KA) merupakan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan. Nilai rata-rata dari KA sebesar 3.16 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan yang dijadikan sampel telah memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK/2015 yang menyatakan bahwa jumlah komite audit di suatu perusahaan minimal yaitu 3 orang. Nilai maksimum KA sebesar 5, yang menjelaskan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel memiliki jumlah komite audit yang terbanyak yaitu 5 komite audit. Nilai minimum KA yang dijadikan sampel yaitu sebesar 3 yang mana menjelaskan bahwa perusahaan telah memenuhi syarat jumlah komite audit

berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK/2015.

Selanjutnya variabel *corporate governance* yang diukur dengan kualitas audit (AUDIT). Kualitas audit dilihat berdasarkan apakah perusahaan tersebut diaudit oleh KAP *Big Four* atau tidak. Berdasarkan Tabel 1 jumlah presentase perusahaan yang dijadikan sampel sebesar 47.5% atau dilihat dari jumlah perusahaan yaitu sebanyak 29 perusahaan. Jumlah presentase perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* yaitu sebesar 52.5% atau sebanyak 32 perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan sudah setengah atau 50% dari perusahaan yang diteliti telah diaudit oleh KAP *Big Four*.

Variabel selanjutnya adalah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Nilai rata-rata dari CSR yaitu sebesar 0.298865. Hal ini menunjukkan perusahaan yang dijadikan sampel rata-rata belum mengungkapkan CSR sebanyak 50% dari seluruh jumlah indeks GRI-G4 (45 atau 46 pengungkapan). Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0.180432, nilai ini lebih kecil dari nilai rata-rata dan menjelaskan presentase rata-rata CSR tidak bervariasi. Nilai maksimum dari CSR yaitu sebesar 0.593407 yang menjelaskan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel melakukan pengungkapan CSR paling tinggi yaitu sebesar 59% dari seluruh pengungkapan di indeks GRI-G4. Nilai minimum dari CSR yaitu sebesar 0.054945 yang menjelaskan bahwa ada perusahaan dijadikan sampel melakukan pengungkapan sebanyak 5.4% dari keseluruhan pengungkapan yang ada di indeks GRI-G4.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang diproses dengan logaritma natural (Ln) total aset. Nilai rata-rata SIZE sebesar 29.00424. Nilai maksimum SIZE sebesar 31.08725 menggambarkan bahwa ada ukuran perusahaan terbesar pada sampel dan nilai

minimum sebesar 25.78026 menggambarkan bahwa ada ukuran perusahaan yang terkecil pada sampel.

Variabel tingkat hutang (LEV) yang diukur dengan rasio *leverage* yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Nilai rata-rata LEV sebesar 0.458407 yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penggunaan hutang perusahaan sampel sebesar 45.84% sebagai sumber pendanaan untuk 100% dari aset yang dimiliki. Nilai maksimum LEV pada perusahaan yang dijadikan sampel sebesar 0.818356 yang menjelaskan bahwa ada perusahaan dari 100% aset yang dimiliki perusahaan, sebanyak 81% didanai oleh hutang. Nilai minimum LEV pada perusahaan yang dijadikan sampel yaitu sebesar 0.041197 yang menjelaskan bahwa dari 100% aset yang dimiliki perusahaan 4,1197% didanai oleh hutang.

Uji Normalitas

Uji yang dilakukan pertama kali sebelum menguji hipotesis adalah uji normalitas data dengan melihat *Jarque-Bera* (JB test) berdasarkan nilai residual. Residual dikatakan memiliki distribusi normal apabila nilai *p-value* diatas 10% dan tidak terdistribusi secara normal jika nilai *p-value* dibawah 10% (Ajija dkk., 2011).

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas Data

Model Per	N	Jarque-Bera	Probability	Keterangan
1	61	10.07441	0.00649	Tidak Normal

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Uji *Jarque-Bera* (JB Test), terlihat model dalam persamaan dalam penelitian ini terdistribusi tidak normal karena *p-value* dari residual dibawah 10% ($0.006492 < p\text{-value}$). Langkah yang dilakukan untuk menormalkan adalah dengan membuang data yang bersifat *outlier* dari keseluruhan observasi. Hasil setelah

membuang data yang *outlier* disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Data (setelah membuang outlier)

Model Persamaan	N	Jarque-Bera	Probability	Keterangan
1	48	1.692911	0.428933	Normal

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Dari hasil perbaikan data observasi, tabel 3 menjelaskan bahwa data telah terdistribusi secara normal karena *p-value* diatas 10% dan banyaknya data obsevasi yang digunakan berkurang yang awalnya sebanyak 61 data menjadi 48.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji LM (Metode *Breusch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs*R-Squared*, dimana jika nilai probabilitas dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan yaitu 5% (Ajija dkk., 2011). Hasil uji autokorelasi model persamaan ini disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Pengujian Autokorelasi

Model Persamaan	<i>Obs*R-squared</i>	Probability	Keterangan
1	0.014	0.907	Bebas Autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4 hasil *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* terlihat nilai *Obs*R-Squared* pada model persamaan (1) sebesar 0.014 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0.907 yang dimana lebih besar dari 0.05 (*p-value* > 5%) sehingga disimpulkan persamaan (1) bebas dari masalah autokorelasi.

Uji Multikolenieritas

Pengujain multikolenieritas dilihat Jika korelasi di antara masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,8, maka terjadi

multikolinieritas (Ajija dkk., 2011). Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel independen bebas masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Hasil yang diperhatikan dari Uji ini adalah nilai F dan *Obs* R-squared*. Jika nilai *p-value* dari *Obs* R-squared* lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi heterokedastisitas, demikian juga, sebaliknya (Ajija dkk., 2011).

Adapun hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model Persamaan	<i>Obs*R-squared</i>	Probability	Keterangan
1	9.818	0.2780	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Dari hasil pengujian heterokedastisitas pada tabel 5 diketahui model persamaan (1) memiliki *p-value Obs*R-Squared* sebesar 0.2780 (*p-value* > 0.05). Dengan demikian dari model persamaan tidak terkena masalah heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 6 Menunjukkan hasil regresi dari pengaruh manajemen laba, *corporate governance*, *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Nilai Koefisien	P value
C		0.668898	0.3705
EM	β_1	-0.672849	0.0086*
KI	β_2	0.016409	0.8766
KM	β_3	0.080637	0.6669
KA	β_4	-0.067254	0.3276
AUDIT	β_5	0.029454	0.5926
CSR	β_6	0.579874	0.0010*
SIZE	β_7	-0.015013	0.5504
LEV	β_8	0.142368	0.2457
<i>R-Squared</i>			0.497667
<i>Adjusted R-Squared</i>			0.394624
F			4.829718
Sig			0.000350

*Signifikan pada tingkat 1%

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel manajemen laba (EM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tiaras dan Wijaya (2012); Winda dkk. (2016) yang menjelaskan bahwa tindakan manajemen laba akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang dibayarkan. Manajer bertindak oportunistik akibat dari asimetris informasi yaitu dengan melakukan manajemen laba dengan motivasi pajak (*taxation motivation*) sehingga tindakan manajemen laba mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Analisis deskriptif variabel manajemen laba menggambarkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel terindikasi melakukan *income decreasing* atau *income minimization* dengan rata-rata 0,018%. Hal ini memberikan bukti bahwa selama periode pengamatan, ada kecenderungan perusahaan melakukan *income decreasing* atau *income minimization* sebagai upaya mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Perusahaan melakukan *income decreasing* semakin tinggi maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil karena laba merupakan patokan dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba yang disesuaikan melalui pilihan akuntansi yang mengurangi laba atau *income decreasing* yang berdampak pada penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian hipotesis ditolak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Pohan (2008); Khurana dan Moser (2009); Dyan (2016) yaitu kepemilikan institusional mempengaruhi tindakan *tax avoidance* perusahaan namun konsisten dengan penelitian khoirunnisa (2014) dan Fadhillah (2014) yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak

berpengaruhnya kepemilikan institusional ini dapat dijelaskan besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* berkurang. Dari statistik deskriptif menjelaskan rata-rata kepemilikan institusional yaitu sebesar 60,8332%, dimana dengan kepemilikan institusional yang cukup tinggi seharusnya mampu menekan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajer. Namun tidak berperannya kepemilikan institusional diindikasikan bahwa kepemilikan institusional memperbolehkan manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan bahwa dengan *tax avoidance* perusahaan akan mendapatkan sumber dana yang berlebih. Sumber dana inilah yang akan digunakan perusahaan untuk tindakan investasi ataupun untuk kesejahteraan kepemilikan institusional itu sendiri.

Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian hipotesis ditolak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Hamed dan Boussaidi (2015); Rahmawati dkk. (2016) yaitu kepemilikan manajerial mempengaruhi tindakan perusahaan melakukan *tax avoidance* dan penelitian dari Huseynov dan Klamm (2012) bagus atau tidaknya *corporate governance* berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Namun konsisten dengan penelitian Dyan (2016) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* menjelaskan bahwa walaupun manajer memiliki saham di perusahaan tersebut, manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya (*entrenchment*) bukan pada upaya menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik perusahaan (*alignment*) karena kepemilikan saham yang dimiliki manajer cukup sedikit. Kepemilikan manajerial yang cukup sedikit dapat dilihat dari rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan

hanya sebesar 4,3662% dari keseluruhan saham yang beredar. Kepemilikan manajerial yang relatif sedikit belum menyelesaikan persoalan keagenan yang terjadi antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) dimana dengan adanya kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan manajer yang dapat merugikan pemilik perusahaan.

Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian hipotesis ditolak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012); Winata (2014) yaitu komite audit mempengaruhi tindakan perusahaan melakukan *tax avoidance* dan penelitian dari Huseynov dan Klamm (2012) bagus atau tidaknya *corporate governance* berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Sedangkan konsisten dengan penelitian dari khoirunnisa (2014) dan Winarsih dkk (2014) yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ditolaknya hipotesis ini menjelaskan bahwa walaupun nilai rata-rata komite audit yang dimiliki perusahaan sudah sesuai dengan peraturan OJK No. 55/POJK/2015 yaitu sebanyak 3 orang, belum mampu menurunkan tindakan *tax avoidance*. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa komite audit telah menelaah laporan keuangan yang akan di keluarkan oleh perusahaan. Adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ini menurut komite audit merupakan hal yang legal, asalkan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Selain itu dapat juga diindikasikan perusahaan hanya sekadar untuk memenuhi peraturan yang ada dan belum melakukan tugas yang ada di peraturan OJK 55/POJK/2015.

Variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian hipotesis ditolak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian dari Khoirunnisa (2014);

Fadhilah (2014); Dyan (2016) yaitu kualitas audit mempengaruhi tindakan perusahaan melakukan *tax avoidance* dan penelitian dari Huseynov dan Klamm (2012) bagus atau tidaknya *corporate governance* berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Namun konsisten dengan penelitian Winata (2014) dimana kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak berpengaruhnya kualitas audit terhadap *tax avoidance* mengindikasikan bahwa auditor hanya memberikan opini audit atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan perusahaan. kewajaran atas penyajian laporan keuangan tersebut salah satunya adalah terkait dengan penerapan standar akuntansi yang berlaku umum yang meliputi pengukuran, pengakuan, dan pelaporan. Pengukuran, pengakuan, dan pelaporan yang berdasarkan standar akuntansi yang digunakan dapat berbeda dengan yang diperkenankan menurut undang-undang perpajakan. Dengan adanya perbedaan tersebut mewajibkan perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Auditor dalam penugasannya dalam pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan tentu saja akan mempertimbangkan bahwa rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh perusahaan akan membuat auditor akan mempertimbangkan untuk memberikan opini atas kewajaran pengungkapan laporan keuangan. Jika pengungkapan atas koreksi fiskal telah disajikan dengan baik oleh perusahaan.

Variabel *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian hipotesis diterima. Penelitian ini konsisten dengan Watson (2011), Lanis dan Richardson (2012) dan (2013) yang menyatakan perusahaan yang sadar sosial (*high level CSR*) cenderung kurang agresif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (*low level CSR*) dalam kebijakan penghindaran

pajaknya. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR yang tinggi cenderung untuk dilakukan *tax avoidance*. Perusahaan akan akan mengungkapkan CSR yang tinggi sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat luar. Legitimasi yang dimiliki perusahaan inilah yang akan dijaga perusahaan yaitu dengan salah satu caranya yaitu tidak melakukan *tax avoidance*.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 1) Manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; 2) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; 3) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; 4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; 5) Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; 6) *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Beberapa hal menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dan saran yang dimaksud antara lain: 1) Nilai rata-rata CETR pada statistik deskriptif menunjukkan nilai CETR 36% yang menjelaskan perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*, maka untuk penelitian selanjutnya menambah kriteria penelitian yaitu dimana nilai CETR yang rendah (dibawah 25%) atau dapat juga melakukan uji beda antara nilai CETR yang tinggi dan rendah; 2) Adanya kontradiksi antara hasil hipotesis untuk manajemen laba dan *corporate governance* apabila diukur

dengan CETR apabila dilihat dari nilai rata-rata statistik deskriptif, maka untuk penelitian selanjutnya mengganti proksi *tax avoidance* seperti *effective tax rate* dan *book tax difference*; 3) Sampel dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan bahwa manajer melakukan *tax avoidance* apakah berhubungan dengan *rent extraction* atau prinsipal yang menugaskan maupun bekerja sama dalam mendapatkan manfaat dari *tax avoidance*, maka untuk penelitian selanjutnya lebih memastikan struktur organisasi perusahaan di Indonesia melalui literatur yang ada sehingga dapat terlihat tujuan dari manajer dalam melakukan tindakan *tax avoidance*; 4) Adanya kontradiksi antara manajemen laba dan *corporate social responsibility* dimana kedua hipotesis ini diterima, maka penelitian selanjutnya mengubah pengukuran dari manajemen laba akrual ke manajemen laba rill

Daftar Rujukan

- Ajija, Shochrul R, Syah W. Sari., Rahmat H. Setianto, Martha R. Primanti 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat., Jakarta.
- Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, hal. 95-189.
- Arifin,Zaenal. 2007. *Teori Keuangan & Pasar Modal*. Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta: EKONISIA.
- Arthana, R. 2011. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Saham Indonesia*. Diakses: <http://jimfeb.ub.ac.id/>
- Deegan, C., Rankin. M., dan Tobin, J., 2002, An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of

- Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability*, Vol.15, No. 3, pp 312-343.
- Desai M. A & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 70, 145-179.
- Dyan, Amila. 2016. Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO yang Listing di BEI 2010-2014). Diakses di <http://scholar.google.co.id/>.
- Fadhillah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Pada Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- GRI 2016, *Sustainability Reporting Guideliness G4*, Global Reporting Initiatives. www.globalreporting.org
- Hamed, M.S., dan Boussaidi.A. 2015. The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, Vol.5(1).
- Huseynov, Fariz dan Klamm, Bonnie K. 2012. Tax Avoidance, Tax Management, and Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance* 18, 804-827.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jones, J. J. 1991. Earnings management during import relief investigations. *Journal of Accounting Research* 29 (2): 193-288
- Kamila, Putri Almainda dan Martani, Dwi. 2013. *Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Khoirunnisa. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Diakses di <http://scholar.google.co.id/>.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com: Working Paper.
- Landolf, U. 2006, Tax and Corporate responsibility, *International Tax Review* 29, 6-9.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*. 31, 86-108
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2013. Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?. *Journal Business Ethics*. Vol. 127.
- Lee, Namyoung dan Swenson, Charles. 2011. Earnings Management through discretionary expenditures in the U.S., Canada, and Asia. *International Business Research*. 4(2). hal 257-266.
- Lindblom, C.K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*. Presented at the *Critical Perspectives on Accounting Conference*, New York, NY.
- O'Donovan, G, 2002. Environmental Disclosure in the Annual Report, Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 15, No. 3

- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*: Jakarta
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Pada Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Universitas Trisakti.
- Rahmawati, Ayu., Wi, M.G. Endang., Rosalita Rachma Agusti. 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1
- Rustiarini, Ni Wayan. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Audit Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 12 (1) : 1-12.
- Schipper, K. 1989. Earnings Management. *Accounting Horizons* 3, 91-106.
- Scott, William, R. 2009. *Financial Accounting Theory*, International Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Schroeder, R. G., Myrtle, W. C., & Jack, M. C. (2014). *Financial Accounting Theory and Analysis : Text and Case Eleventh Edition*. USA: Wiley.
- Siallagan, H., dan M. Machfoedz. 2006. *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujoko dan Subiantoro, Ugy. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan (Studi empirik pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra*.
- Tiaras, Irvan dan Wijaya, Henryanto. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 03.
- Trisna, Nila Syanthi., Sudarma, Made., dan Erwin Saraswati. 2012. Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No. 80/DIKTI/Kep/2012.
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Pramuka, Bambang Agus. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go public Sektor Manufaktur)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Watson, Luke. 2011. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. www.ssrn.com
- Whyudi, Dudi. 2015. Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Widyaswara Network Jorunal*, Edisi 2, No. 4.
- Wijayanti, Provita dan Slamet, Abdul. 2012. Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Insentif dan Non Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Conference In Bussines, Accounting and Management (CBAM)*, Vol. 1 No. 1.
- Winarsih, Rina., Prasetyono, Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Pengaruh Good*

Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2012). Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.

Winata, Fenny. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 1.

Winda, Nadya Sari., Pratomo, Dudi SET., M.Ak., dan Siska Priyandi Yudowati, S.E., MBA.2016. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2015. Diakses:

library.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/116361/jurnal_eproc/jurnal_eproc.